

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi dalam perekonomian suatu wilayah, sehingga pendapatan per kapita meningkat dan tercapai kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan kuantitatif dalam output produksi semata, melainkan merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan distribusi pendapatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Arsyad (2010) dalam Novia & Prihadi (2022) tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Maka dari itu terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah ilusi pembangunan jika tidak mampu mengurangi kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil di seluruh wilayah. Ketimpangan pendapatan sering kali mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Teori Kurva U Terbalik Kuznets (1995) dalam Hermawan & Taher (2025) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh proses transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri, urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota, serta perbedaan produktivitas dan kepemilikan faktor produksi. Pada tahap awal

pembangunan faktor-faktor tersebut meningkatkan ketimpangan, tetapi pada tahap lanjut ketimpangan akan menurun sehingga membentuk pola kurva U terbalik.

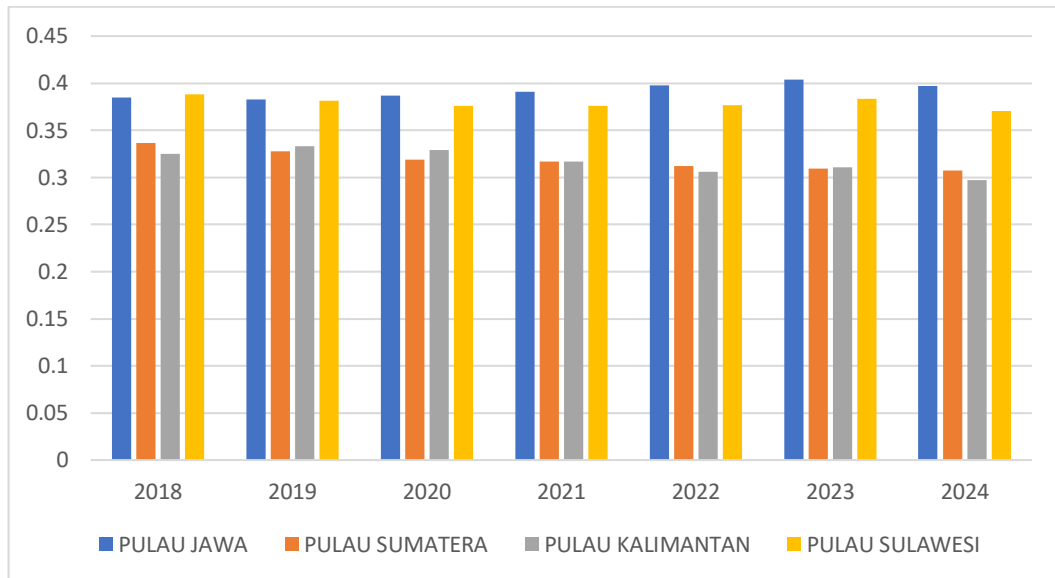
Kesejahteraan masyarakat merupakan orientasi utama dalam proses pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia yang terus berkembang sebagai negara berkembang. Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik dengan kepulauan yang luas dan populasi yang tersebar di berbagai wilayah. Pulau Jawa, sebagai wilayah yang padat dan aktif secara ekonomi, memainkan peran penting dalam dinamika perekonomian nasional. Sebagai pusat utama konsentrasi penduduk dan aktivitas perekonomian nasional di Indonesia. Pulau Jawa menampung lebih dari separuh populasi sekaligus berkontribusi dominan pada Produk Domestik Bruto. Sebagai pusat perekonomian dan dengan populasi terbesar di Indonesia, Pulau Jawa mencatat 55,93% populasi nasional dari total penduduk Indonesia atau sekitar 157,39 juta jiwa dari 281,6 juta jiwa, dan memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,70% terhadap PDB Indonesia. Kondisi ini menempatkan Pulau Jawa sebagai pusat pergerakan tenaga kerja, investasi, dan inovasi. Dengan demikian, pemahaman tentang dinamika ekonomi Pulau Jawa menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana kesejahteraan masyarakat berkembang dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi seringkali diiringi oleh tantangan ketimpangan distribusi pendapatan, di mana manfaat pertumbuhan tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Todaro (2003:234) dalam Prastiwi et al., (2020) Ketimpangan pendapatan merujuk pada

perbedaan pendapatan relatif warga negara berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Dampak dari adanya ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi keberlanjutan proses pembangunan, khususnya dalam aspek pembangunan ekonomi. Kompleksitas permasalahan ketimpangan pendapatan ini bertambah ketika dihadapkan pada dinamika pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui UU 59/2024 sebagai acuan utama arah pembangunan selama 20 tahun ke depan, yang selanjutnya dioperasionalkan dalam RPJMN 2025-2029 yang membidik tiga sasaran utama yaitu penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5%, peningkatan kualitas sumber daya manusia mencapai 0,59 persen%, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029. Prioritas Nasional keenam dalam RPJMN 2025-2029 secara eksplisit menekankan pentingnya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi ketimpangan melalui pendekatan pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif sendiri didefinisikan sebagai pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata rasio gini di Pulau Jawa pada tahun 2024 mencapai 0,397, melampaui rata-rata nasional sebesar 0,381, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih tajam dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Secara spesifik, rata-rata koefisien gini

ratio antar pulau tahun 2024 dapat dilihat dalam grafik yang telah di sajikan di bawah ini.



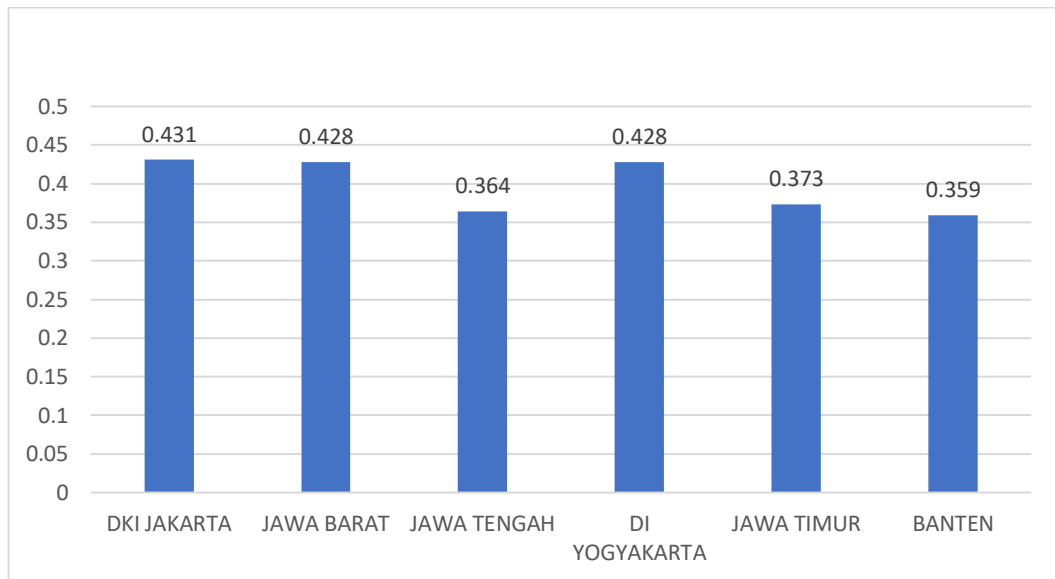
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1. 1 Rata-rata Koefisien Gini Antar Pulau Tahun 2018-2024
(Indeks)**

Pulau Jawa konsisten mempertahankan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di antara semua pulau utama Indonesia selama periode 2018-2024, mencerminkan konsentrasi ekonomi yang sangat tajam di wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan nasional. Penyebab utama tingginya ketimpangan Pulau Jawa adalah konsentrasi geografis aktivitas ekonomi dan investasi yang terkonsentrasi di Jakarta dan daerah metropolitan urban lainnya, sementara daerah rural dan pinggiran kota masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah dan upah subsisten. Tingginya urbanisasi cepat di Jawa telah menciptakan *dual labor market* antara sektor formal terampil urban yakni manufaktur, jasa keuangan,

dan teknologi yang berbasis Jakarta-Surabaya dengan upah tinggi, dan sektor informal perkotaan-rural yang padat kerja namun upah sangat rendah, sehingga mengakibatkan divergensi penghasilan yang lebar antar kelompok pekerja. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 secara paradoks menekan gini ratio Pulau Jawa. Namun, penurunan ini bukan indikasi perbaikan distribusi melainkan hasil dari kontraksi ekonomi yang menyentuh secara merata semua segmen, terutama sektor informal urban yang mengalami krisis pekerjaan masif selama *lockdown* dan pembatasan mobilitas. Setelah tahun 2020, ketimpangan Jawa justru meningkat kembali mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pasca-COVID tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan, melainkan pemusatan kembali pada sektor formal dan digital yang didominasi perusahaan besar dan multinasional.

Permasalahan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa telah berkembang menjadi isu prioritas untuk ditangani mengingat data terkini menunjukkan tren peningkatan. Meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan stabil pada kisaran 5% dan berhasil mencapai status negara berpendapatan menengah atas dengan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta, pencapaian tersebut belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Meningkatnya ketimpangan ini semakin nyata ketika proporsi pengeluaran kelompok 20% teratas meningkat dari 45,91% menjadi 46,24%, sementara kelompok 40% terbawah hanya mengalami kenaikan tipis dari 18,40% menjadi 18,41%. Kondisi ini menunjukkan rendahnya daya beli masyarakat bawah dan mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok penduduk atas.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 2 Koefisien Gini Tiap Provinsi Tahun 2024 (Indeks)

Data terkini menunjukkan adanya variasi rasio gini yang signifikan antar provinsi di Pulau Jawa, dengan DKI Jakarta mencatat rasio tertinggi sebesar, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat yang sama-sama mencapai tingkat ketimpangan pendapatan yang sama, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Perbedaan dalam distribusi pendapatan tersebut menggambarkan adanya disparitas kesejahteraan antarwilayah di Pulau Jawa. Tingkat ketimpangan yang tinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut tidak merata, dengan sebagian besar pendapatan terkonsentrasi di kelompok masyarakat tertentu. Kondisi ini dapat disebabkan oleh dominasi sektor ekonomi yang masih terbatas pada sektor tertentu seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, di mana manfaat ekonomi lebih banyak

dinikmati oleh kelompok perusahaan besar dan tenaga kerja berkualifikasi tinggi daripada pekerja informal dan masyarakat perdesaan. Di sisi lain, provinsi seperti Jawa Tengah dan Banten menunjukkan kondisi ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain, yang tercermin dari nilai koefisien gini. Meskipun demikian, kedua provinsi ini masih menghadapi isu distribusi pendapatan yang belum optimal tetap menghadapi pembangunan regional yang komprehensif.

Memahami akar masalah ketimpangan pendapatan diperlukan analisis komprehensif terhadap berbagai faktor yang membentuk pola distribusi ekonomi di suatu wilayah. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab utama ketimpangan, antara lain tingkat pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kebijakan upah yang direpresentasikan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP), kapasitas ekonomi wilayah yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta ketersediaan infrastruktur dasar khususnya ketenagalistrikan. Disparitas dalam keempat faktor ini menciptakan ketimpangan struktural yang semakin melebarkan ketimpangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan kelompok berpenghasilan rendah, serta antara wilayah maju dengan wilayah tertinggal di Pulau Jawa.

Secara teori hubungan antara IPM, UMP, PDRB, dan Konsumsi listrik dapat dijelaskan melalui teori kurva U terbalik. Menurut teori, Kuznets (1995) dalam Oyvat (2015) mengemukakan hipotesis *inverted U-curve* (kurva U terbalik) yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi sumber daya manusia belum memadai, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Namun, setelah mencapai titik tertentu dan terjadinya transformasi struktural dari pertanian ke industri pekerja mendapatkan upah yang setara, yang pada akhirnya ketimpangan akan menurun seiring dengan semakin matangnya struktur ekonomi. Hipotesis ini didasarkan pada penelitian beberapa negara yang membandingkan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, di mana Kuznets menemukan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju.

Permasalahan yang muncul dari ketimpangan pendapatan dalam korelasinya dengan faktor-faktor determinan seperti IPM, UMP, PDRB, dan Konsumsi listrik dapat dilihat dari fenomena bahwa terjadi ketidakselarasan antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan realita yang ada. Dapat diasumsikan bahwa IPM, UMP, PDRB dan Konsumsi listrik berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, pada realitanya hubungannya dengan ketimpangan pendapatan tidak selalu sesuai dengan asumsi.

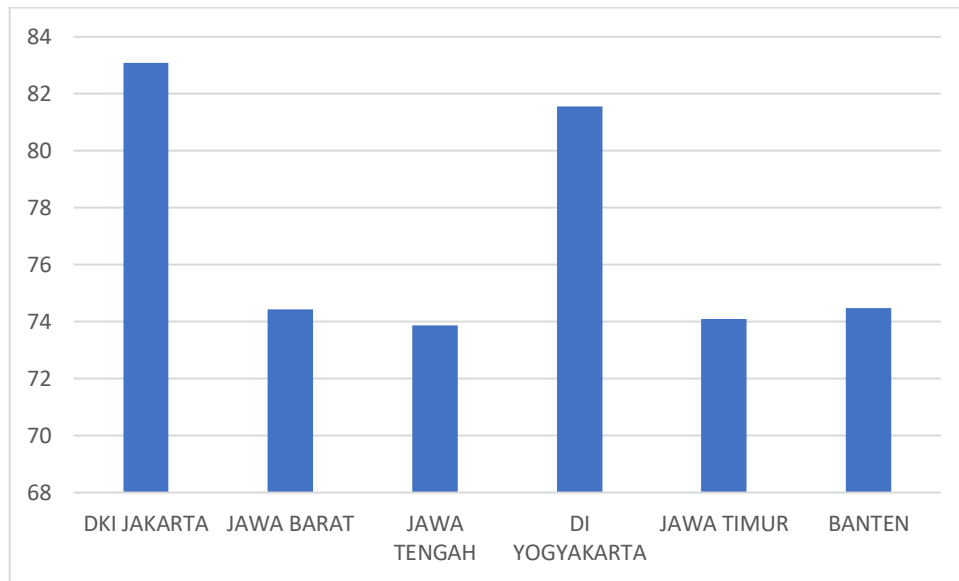
Berdasarkan penelitian Sutrisno et al., (2024) yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, berdasarkan penelitian Yuliana & Rosyadi (2025) menemukan pengaruh negatif dari IPM terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian penelitian oleh Alex O et al., (2025) menemukan bahwa akses listrik berkontribusi positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan penelitian oleh Abdulai et al., (2025) menunjukkan bahwa peningkatan akses listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Selain itu, UMP memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, selaras dengan teori kurva U terbalik. Hal ini sesuai dengan temuan Nora Herlina et al., (2022) bahwa UMP berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, hasil Julihanza & Khoirudin (2023) yang menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya PDRB apabila sesuai asumsi teori bahwa memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Andina et al., (2021) menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Sebaliknya Penelitian Wijayanti & Nanda Putri (2023) menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Adanya hubungan yang bervariasi dan adanya kesenjangan penelitian ini menjadi urgensi perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada.

Pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan menjadi faktor penting dalam memahami distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Menurut teori *human capital* oleh Becker modal manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan kesehatan merupakan suatu aset yang menghasilkan pendapatan dan output berguna lainnya selama jangka waktu yang panjang, sama halnya dengan aset finansial dan fisik. Peningkatan IPM dapat membawa dampak jangka panjang yang lebih luas dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Komponen indeks pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup merupakan kombinasi agar dapat meningkatkan kompetensi dalam mengakses peluang ekonomi. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

pemberdayaan individu, dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori *human capital* Becker yakni dengan tingginya modal manusia dapat menimbulkan distribusi peluang kerja yang lebih merata di sektor ekonomi industri. Di sisi lain juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan pendapatan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Pada gambar dibawah mengungkapkan bahwa Tahun 2024 IPM tertinggi di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan cerminan dari investasi besar dalam kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Di kedua provinsi ini, angka harapan lama sekolah telah melampaui 13 tahun, menandakan bahwa sebagian besar penduduk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas dan banyak melanjutkan ke perguruan tinggi. Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh kehadiran perguruan tinggi dan sejumlah akademi vokasi yang tersebar merata, sementara DKI Jakarta memiliki konsentrasi sekolah bersertifikat dan program beasiswa yang mempermudah akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di sektor kesehatan, rasio puskesmas dan rumah sakit di Jakarta dan Yogyakarta, memastikan cakupan layanan primer dan tersier yang merata, sehingga angka harapan hidup di kedua daerah ini berada di rentang 73-74,5 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

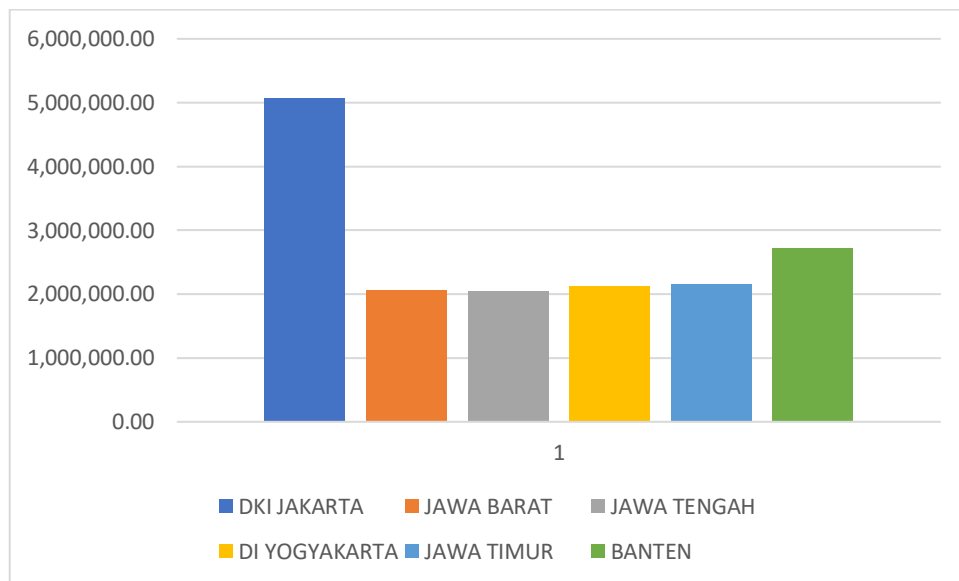
Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2024

(Indeks)

Sebaliknya, provinsi dengan IPM menengah seperti Jawa Barat dan Banten masih menghadapi tantangan disparitas antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Meskipun program wajib belajar 12 tahun dan jaminan kesehatan nasional telah meningkatkan akses pendidikan menengah dan layanan medis, kualitas guru dan tenaga kesehatan bervariasi. Kota-kota besar seperti Bandung dan Tangerang memiliki fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan daerah pegunungan dan pesisir. Jawa Timur mencatat capaian serupa berkat pengembangan politeknik dan balai latihan kerja, namun prevalensi penyakit tidak menular di beberapa kota kabupaten didorong oleh pola hidup urban serta keterbatasan fasilitas kesehatan primer di daerah terpencil menahan angka harapan hidup. Jawa Tengah, sebagai provinsi dengan IPM terendah di Pulau Jawa, masih bergulat dengan rata-rata lama sekolah yang belum mencapai 12

tahun dan ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan serta puskesmas di wilayah pedesaan. Kondisi ini memperlambat peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh dan memperpanjang siklus kemiskinan di komunitas terpencil.

Faktor selanjutnya yang dapat berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP ini sangat penting karena menetapkan ambang batas upah yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemberi kerja di sektor formal, sehingga berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan langsung kepada pekerja berpenghasilan rendah. Menurut teori upah efisiensi Shapiro & Stiglitz E (1985) dalam Sari (2021), perusahaan yang membayar upah di atas tingkat pasar cenderung mengalami peningkatan produktivitas, penurunan tingkat absensi, dan peningkatan loyalitas tenaga kerja, dikarenakan pekerja merasa dihargai dan termotivasi. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas UMP dalam mengurangi ketimpangan sangat bergantung pada dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat kepatuhan dari pihak pengusaha. Di kawasan dengan konsentrasi perusahaan besar dan infrastruktur pelatihan kerja yang memadai, penetapan upah minimum mendorong perusahaan menambah program pelatihan dan insentif kinerja, sehingga produktivitas buruh meningkat dan ketimpangan upah menipis. Sebaliknya, di area dengan dominasi sektor informal, banyak pekerja tidak tercakup dalam regulasi upah minimum, yang mengakibatkan praktik pengurangan jam kerja, perekrutan pekerja paruh waktu tanpa jaminan, atau penawaran upah di bawah standar sebagai respons terhadap kenaikan biaya upah. Adapun gambar grafik UMP pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2024 disajikan di bawah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1. 4 Tingkat Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2024
(Rupiah)**

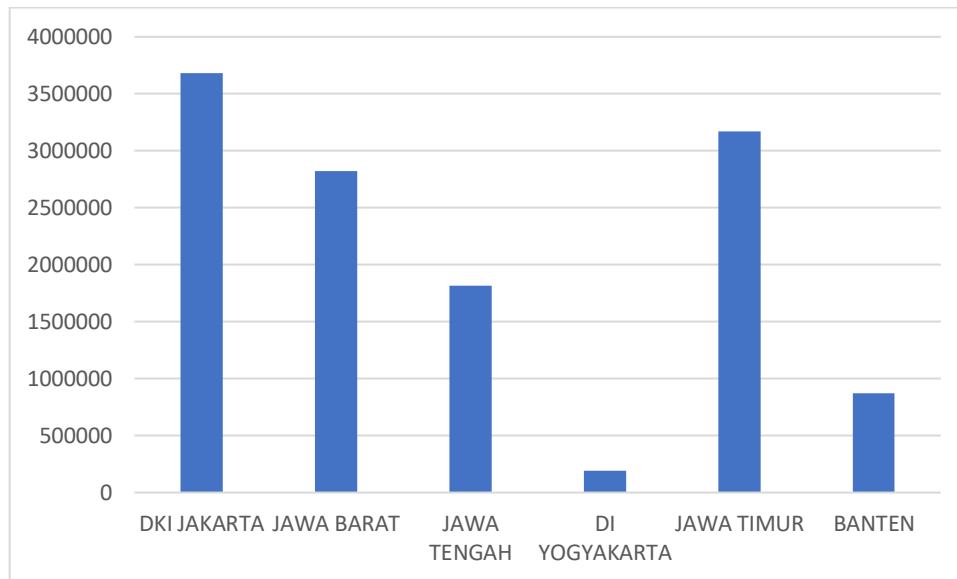
Berdasarkan gambar 1. 4 grafik Tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 memperlihatkan variasi yang mencerminkan keragaman struktur ekonomi dan daya beli di Pulau Jawa. DKI Jakarta, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pusat pemerintahan, menetapkan UMP tertinggi. Besaran ini tidak hanya menandai tingginya biaya hidup di ibu kota, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen proteksi pendapatan bagi pekerja di sektor formal menghasilkan efek domino berupa peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemulihan permintaan domestik. Perusahaan di wilayah ini merespons regulasi upah minimum dengan melakukan investasi dalam program peningkatan kompetensi karyawan serta adopsi teknologi otomatisasi produksi untuk menjaga efisiensi biaya tenaga kerja yang meningkat.

Sebaliknya, provinsi lain menetapkan UMP lebih rendah, Banten, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Penetapan UMP menengah pada Banten, Jawa Timur, dan DIY menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal dan kesejahteraan pekerja, sehingga meminimalkan risiko pengurangan tenaga kerja formal sambil mempertahankan daya beli. Namun, wilayah dengan UMP terendah Jawa Barat dan Jawa Tengah menghadapi konstelasi pasar tenaga kerja informal yang luas, di mana angka pekerja yang tidak terikat regulasi UMP tinggi. Akibatnya, kebijakan upah minimum di tingkat rendah ini seringkali gagal meningkatkan redistribusi pendapatan, malah mendorong munculnya praktik kerja paruh waktu tanpa jaminan dan upah di bawah standar yang memperlebar ketimpangan pendapatan tanpa adanya penguatan pelatihan vokasi atau pengawasan ketat atas kepatuhan pengusaha.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu provinsi tanpa penyesuaian inflasi, sehingga memberikan gambaran langsung tentang ukuran dan dinamika perekonomian regional. Secara umum, provinsi dengan perekonomian yang kuat ditopang oleh sektor industri, jasa, dan perdagangan menunjukkan PDRB nominal yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi berbasis agraris atau dengan porsi UMKM dominan. Dalam kerangka teori pertumbuhan neoklasik M. Solow (1956), perbedaan PDRB antarwilayah dapat dijelaskan oleh divergensi akumulasi modal dan produktivitas total faktor (TFP).

Wilayah dengan akumulasi modal lebih besar baik dalam bentuk investasi fisik, infrastruktur, maupun sumber daya manusia terampil menunjukkan PDRB yang lebih tinggi dan laju pertumbuhan yang lebih cepat, sedangkan daerah dengan akumulasi modal rendah terperangkap pada *steady state* yang rendah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 menunjukkan disparitas nilai agregat sektor ekonomi antarprovinsi. DKI Jakarta mencatat PDRB tertinggi di Pulau Jawa dengan total mencapai sekitar 3.679.359 miliar rupiah, menegaskan posisinya sebagai pusat kegiatan jasa, keuangan, dan pemerintahan nasional. Jawa Timur berada di urutan kedua dengan PDRB senilai 3.168.296 miliar rupiah, didorong oleh kekuatan sektor manufaktur dan perdagangan komoditas. Jawa Barat pada posisi ketiga mencatat nilai PDRB sekitar 2.823.339 miliar rupiah, berkat keberadaan kawasan industri padat karya dan klaster agribisnis yang luas. Jawa Tengah dan Banten memiliki nilai PDRB menengah masing-masing 1.817.777 miliar dan 873.626 miliar rupiah yang mencerminkan komposisi ekonomi campuran antara sektor primer, industri ringan, dan UMKM. Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat paling rendah dengan PDRB sebesar 193.515 miliar rupiah, mencerminkan skala ekonomi dan wilayah yang lebih kecil serta ketergantungan pada sektor pariwisata serta pendidikan. Untuk lebih memahami hal tersebut berikut disajikan gambar grafik PDRB pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2024 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 5 Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Tahun 2024

(Miliar Rupiah)

Jawa Tengah dan Banten memiliki nilai PDRB menengah masing-masing 1.817.777,96 miliar dan 873.626,25 miliar rupiah yang mencerminkan komposisi ekonomi campuran antara sektor primer, industri ringan, dan UMKM. Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat paling rendah dengan PDRB sebesar 193.514,56 miliar rupiah, mencerminkan skala ekonomi dan wilayah yang lebih kecil serta ketergantungan pada sektor pariwisata serta pendidikan.

Kondisi konsentrasi PDRB pada provinsi-provinsi besar menimbulkan efek aglomerasi ekonomi yang memperkuat proverbal sentralisasi pertumbuhan. Daerah-daerah dengan nilai PDRB tinggi mampu menarik investasi dan menyerap tenaga kerja terampil, sehingga menghasilkan kesempatan kerja formal dengan upah relatif lebih kompetitif. Sebaliknya, wilayah dengan PDRB rendah sering

berhadapan dengan dominasi sektor informal dan terbatasnya infrastruktur produktif, yang menghambat kenaikan upah dan distribusi manfaat ekonomi.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah konsumsi listrik. Pemilihan variabel ini sebagai salah satu determinan ketimpangan pendapatan dan sekaligus kebaharuan dalam penelitian ini didasarkan pada urgensi peran distribusi listrik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, hal ini dikarenakan ekonomi yang berkembang tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Secara teoritis, pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan dijelaskan melalui teori pertumbuhan endogen (*Endogenous Growth Theory*) yang dikembangkan oleh Lucas (1988) menekankan bahwa infrastruktur sosial dan fisik merupakan investasi dalam penyebaran pengetahuan dan pembentukan modal manusia, yang meningkatkan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan dan berdampak pada pemerataan kesempatan ekonomi antarwilayah.

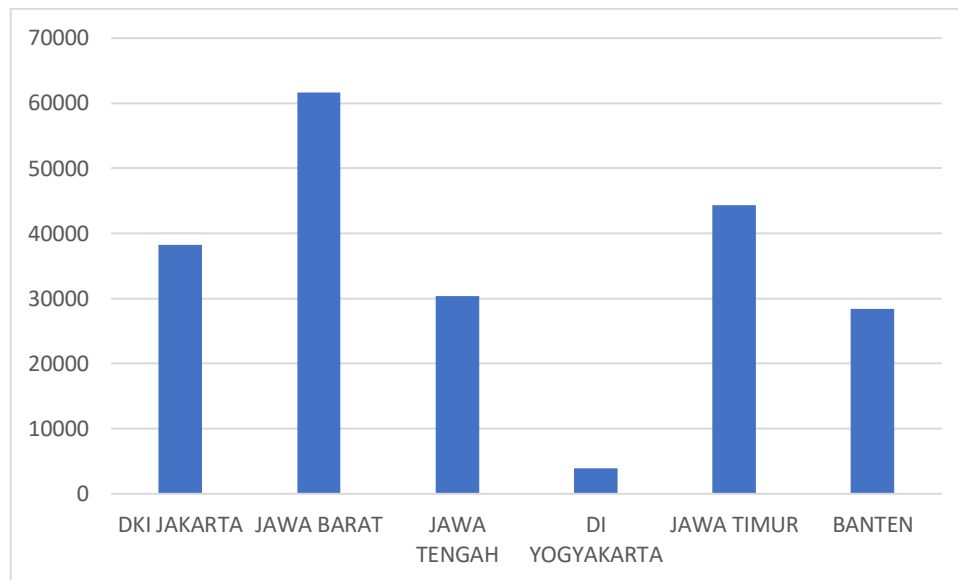
Romer (1990) menunjukkan bahwa infrastruktur publik yang berkualitas tinggi memfasilitasi penyebaran teknologi dan inovasi dari daerah maju ke daerah tertinggal, sehingga menciptakan efek konvergensi dalam pendapatan perkapita antarwilayah. Infrastruktur publik berperan sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Jaringan jalan, pelabuhan, bandara, dan telekomunikasi yang memadai meningkatkan konektivitas antardaerah, memfasilitasi distribusi barang dan jasa, serta menurunkan biaya logistik. Infrastruktur air bersih dan sanitasi mendukung kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, sementara sistem transportasi massa menyokong mobilitas

tenaga kerja dan akses ke peluang ekonomi. Secara keseluruhan, infrastruktur yang terintegrasi dan terpelihara baik menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik modal domestik maupun asing, dan memperlebar basis ekonomi ke wilayah yang sebelumnya tertinggal.

Di antara berbagai jenis infrastruktur, jaringan listrik menempati posisi sentral karena menjadi kebutuhan dasar bagi hampir seluruh kegiatan ekonomi. Ketersediaan pasokan listrik yang mumpuni dan berkelanjutan memungkinkan pabrik menjalankan mesin produksi secara efisien, usaha mikro dan kecil mengoperasikan peralatan, serta sektor jasa seperti perhotelan dan teknologi memberikan layanan tanpa gangguan. Namun, jika perluasan konsumsi listrik terpusat di daerah perkotaan, fenomena lingkaran setan kemiskinan dapat terjadi di wilayah perdesaan, di mana minimnya akses listrik menghambat investasi dan pertumbuhan industri lokal, sehingga ketimpangan pendapatan antarwilayah semakin melebar.

Diketahui bahwa provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dalam konsumsi listrik (GWh) di Pulau Jawa tahun 2024, menggeser Jawa Barat dari posisi teratas. Lonjakan konsumsi ini terutama dipicu oleh tingginya konsentrasi gedung perkantoran, pusat bisnis, serta infrastruktur publik seperti pusat data dan transportasi massal berbasis listrik yang menuntut pasokan energi berkelanjutan. Selain itu, Jakarta menjadi episentrum kegiatan pemerintahan, keuangan, dan komersial, sehingga beban puncak listrik di Jakarta melampaui provinsi lain meski lahan terbatas memaksa industri berat beralih ke wilayah penyangga. Untuk memberikan gambaran kondisi konsumsi listrik di Pulau Jawa,

berikut disajikan grafik yang menggambarkan data konsumsi listrik pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 6 Konsumsi listrik di Pulau Jawa Tahun 2024 (GWh)

Jawa Barat menempati posisi tertinggi. Hal ini mencerminkan perannya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa serta sebagai pusat utama kawasan industri manufaktur dan permukiman penyangga ibu kota. Tingginya aktivitas industri, kawasan industri skala besar, serta pertumbuhan kawasan urban mendorong kebutuhan dan kapasitas konsumsi listrik yang sangat besar. Jawa Timur berada pada posisi kedua. Konsumsi listrik yang relatif tinggi di provinsi ini didorong oleh luas wilayah, konsentrasi zona ekonomi, pelabuhan, serta aktivitas perdagangan dan industri pengolahan yang tersebar di berbagai daerah. Kebutuhan listrik berskala besar diperlukan untuk menopang kegiatan ekonomi regional dan industri berbasis logistik.

DKI Jakarta berada di posisi berikutnya dengan nilai konsumsi listrik yang tetap tinggi meskipun wilayahnya relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor jasa, perkantoran, bisnis, dan permukiman perkotaan dengan intensitas konsumsi listrik yang tinggi, sehingga memerlukan sistem kelistrikan yang andal dan padat. Jawa Tengah dan Banten menunjukkan tingkat konsumsi listrik menengah. Jawa Tengah didorong oleh perkembangan industri ringan, UMKM, dan urbanisasi yang bertahap, sementara Banten dipengaruhi oleh keberadaan kawasan industri penyangga Jakarta serta aktivitas manufaktur dan permukiman, meskipun skalanya belum sebesar Jawa Barat dan Jawa Timur.

Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi terendah. Hal ini mencerminkan struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor pendidikan, pariwisata, dan jasa budaya, dengan keterbatasan industri besar. Akibatnya, kebutuhan dan pembangunan konsumsi listrik relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pembangunan konsumsi listrik di Pulau Jawa sangat berkorelasi dengan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, serta struktur dan intensitas kegiatan ekonomi, khususnya sektor industri dan jasa.

Kompleksnya faktor determinan ketimpangan pendapatan dan juga adanya fenomena yang mendasari, serta adanya kesenjangan penelitian menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Di sisi lain adanya kesenjangan penelitian variabel konsumsi listrik menjadikan suatu kebaruan atau *novelty* yang

diharapkan akan menambah wawasan baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Penulis tertarik mengkaji menggunakan variabel IPM, UMP, PDRB, dan konsumsi listrik secara bersamaan dalam satu model masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mengkaji beberapa variabel atau menggunakan cakupan wilayah yang berbeda, tetapi kajian tentang bagaimana keempat variabel ini berinteraksi satu sama lain dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa masih terbatas.

Berdasarkan uraian fenomena, permasalahan, perbedaan pada hasil penelitian terdahulu, serta kebaharuan yang ada untuk membuktikan bagaimana faktor-faktor yang telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Bruto Regional, dan Konsumsi listrik terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2018-2024”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto dan Konsumsi listrik secara parsial berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2018-2024?

2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Konsumsi listrik secara bersama-sama berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto dan Konsumsi listrik secara parsial berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2018-2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto dan Konsumsi listrik secara bersama sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2018-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hal yang baru dalam penelitian ini adalah Konsumsi listrik sebagai variabel yang dianalisis terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, Produk

Domestik Bruto Regional, dan Konsumsi Listrik terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2018-2024.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi para pemangku kebijakan agar dapat membuat kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Selain itu dapat menjadi sumber dan referensi bagi peneliti selanjutnya baik dalam lingkungan kampus maupun luas.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pulau Jawa yang meliputi enam provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui akses pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan dan mulai diterbitkannya SK pembimbing. Adapun rencana jadwal dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

